

Analisis Kegiatan Penangkapan Kapal Asing oleh Bakamla sebagai Perlindungan Wilayah Laut Indonesia

Ahmed Varrel Alkahfi Mauza

ahmadvare17@gmail.com

Kasus Penangkapan Kapal oleh Bakamla

Laut merupakan salah satu ruang yang menghubungkan antara sebuah daratan dengan daratan lain yang berupa perairan. Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Hal tersebut kemudian menjadikan Indonesia memiliki kekayaan hasil laut yang melimpah. Oleh karena itu, banyak kapal asing yang mencoba untuk mencuri kekayaan laut di Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982, setiap negara memiliki hak kedaulatan penuh terhadap zona laut yang telah ditentukan.

Badan Keamanan Laut atau yang biasa disingkat dengan Bakamla, berdiri pada tahun 2014 yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam melakukan tindak keamanan kemaritiman di Indonesia. Akibat dari laut yang sangat luas dan garis pantai yang panjang tentu akan sangat sulit mengontrol seluruh laut yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa Tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.¹

Dasar hukum yang digunakan oleh Bakamla adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014. Tugas dan kewenangan Bakamla adalah sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah maritime Indonesia. Bakamla yang menggunakan nama sebagai *Indonesian Coast Guard* (ICG) menggantikan Bakorkamla yang dinilai sudah tidak mampu dalam kebutuhan lingkungan maritime. (Azis, 2016).

Penangkapan Kapal oleh Bakamla pada tahun 2015

Pada tahun 2015, Bakamla telah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut sebanyak 15 kali. Patroli tersebut dilakukan secara mandiri sebanyak 6 kali dan patroli bersama sebanyak 9 kali yang meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia. Bakamla memperoleh hasil dengan melakukan pemeriksaan kapal berjumlah 2.100 kapal diperiksa, 40 kapal diberikan teguran, dan 28 kapal ditangkap. Pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh Bakamla tersebut

¹ Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

mendapat bantuan dukungan dari kementerian/lembaga yang juga menyelenggarakan operasi seperti Polair, TNI AL, Ditjen Hubla, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen PSDKP.

Data dan informasi EWS menjadi penentu keberhasilan dalam operasi yang dijalankan oleh Bakamla. EWS adalah singkatan dari *Early Warning System* dengan kemampuan mendeteksi anomali kapal-kapal yang sedang berlayar di perairan Indonesia. Peralatan tersebut tentu saja sangat membantu dan mempermudah kinerja dari Bakamla untuk melakukan tindak proses penegakan hukum di perairan Indonesia. Sasaran operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla mencakup tindak *illegal fishing*, penyelundupan baik barang, migran, narkoba, senjata, dan pencemaran laut.

Penangkapan Kapal oleh Bakamla pada tahun 2016

Pada tahun 2016, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., menyampaikan hasil yang telah dicapai. Hingga bulan November 2016, Bakamla berhasil melakukan penangkapan 66 Kapal. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Sesuai dengan orientasi RPJMN Bakamla 2014-2019 yaitu meningkatkan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum di laut.

Dalam melaksanakan peningkatan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum di laut, Bakamla masih menggunakan *Early Warning System (EWS)* dan juga teknologi Monitoring dan Analisa (Monalisa). Dengan begitu, setiap titik perairan di Indonesia mendapatkan fasilitas keamanan dan keselamatan yang memadai.

Penangkapan Kapal pada tahun 2017

Melalui Operasi Nusantara I s.d IX yang diselenggarakan dengan melibatkan beberapa lembaga seperti Bakamla RI, TNI AL, PSDKP, Bea Cukai Polair dan Imigrasi pada tahun 2017 telah berhasil melakukan penangkapan sebanyak 67 kapal. Kapal yang ditangkap tersebut melakukan pelanggaran tindak pidana antara lain penangkapan ikan, izin pelayaran, kepabeanan, migas, dll. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Operasi Laut Bakamla Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr.

Penangkapan Kapal pada tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Bakamla telah memeriksa 1.018 kapal dan sebanyak 24 kapal telah diproses. Dari 1.018 kapal yang diperiksa, terdapat juga kapal Indonesia yang umumnya diperiksa karena melakukan kesalahan administrasi. Kepala Bakamla RI mengungkapkan bahwa kerawanan keamanan laut mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang diduga akibat adanya penurunan kegiatan patroli yang disebabkan oleh pandemi Covid.

Penangkapan Kapal pada tahun 2021

Januari : 9 Kapal ikan ditangkap

Maret : 2 Kapal berbendera Malaysia ditangkap karena mencuri ikan dan 3 kapal ditangkap karena transaksi BBM Ilegal.

Kerjasama Bakamla dengan Kementerian dan Lembaga Internasional

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Sejak berdirinya Bakamla pada tahun 2014, berbagai operasi telah dilaksanakan oleh Bakamla mulai dari operasi regional hingga internasional. Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh Bakamla RI adalah kerjasama dengan *Australian Border Force (ABF)*. Kerjasama tersebut berupa Operasi *Shearwater* yang dilaksanakan dengan operasi udara maritim untuk pertama kalinya. Operasi udara tersebut dilaksanakan melalui patroli pemantauan udara maritim di wilayah bagian timur perairan Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan keamanan laut di bagian perbatasan dengan negara lain, Bakamla RI bekerja sama dengan Australia dengan melaksanakan operasi bersama. Operasi bersama tersebut adalah Patroli Terkoordinasi *Shearwater IV* di Laut Arafuru bersama dengan *Australian Border Force (ABF)*. Operasi patroli bersama tersebut telah menjadi agenda penting Bakamla RI yang ditujukan untuk pencapaian keselamatan serta keamanan perairan Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2017.

Pada *Shearwater V* yang diadakan pada bulan Oktober 2017, latihan bersama antara Bakamla RI-ABF dilakukan di Laut Timor. Satgas *Shearwater* Letkol Laut (P) Asep Budiman menjelaskan bahwa latihan bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama operasi antara aparat laut dari kedua negara khususnya dalam mengantisipasi kegiatan ilegal di laut².

² Yetti Rahmadani. Bakamla dan ABF Gelar Shearwater V. Diakses dari <https://www.rmolbengkulu.id/bakamla-dan-abf-gelar-shearwater-v>, pukul 19:22

Kemudian pada tahun 2018, kerjasama antara Indonesia-Australia kembali ditekan oleh Bakamla RI dengan ABF.

Kerjasama antara Bakamla RI dengan ABF bertajuk *Arrangement on Maritime Security Cooperation*. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo dan Australian Charge d’Affairs Allaster Cox di Kantor Pusat Bakamla RI. Kerjasama yang dilakukan mencakup patroli terkoordinasi, pelatihan Bahasa Inggris serta pelatihan teknis di kapal. Kegiatan yang telah direncanakan dan ditekankan dalam kerjasama tersebut menunjukkan komitmen antara kedua negara dalam melawan ancaman di kawasan perairan perbatasan Indonesia-Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanto, P. T. (2019). IMPLEMENTASI DEVELOPMENTAL STATE INDIA DALAM MENGHADAPI PATEN TRIPS DAN STRATEGI RANBAXY LAB. DALAM PERSAINGAN GLOBAL. *TransBorders: International Relations Journal*, 3(1), 43-50.
- Arisanto, P. T., & Pratiwi, T. S. (2020). Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi Di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 69–86.
- Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163-183.
- Ayuningtyas, D. 2016. *Kepentingan Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015*. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 5, 2018: 001-014*.
- Azis, dkk. (2016). *Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 5(4),s 1-13.
- Irvina Falah. (2016). *Capaian Operasi dan Latihan Keamanan dan Keselamatan Bakamla 2015 dan Target 2016*. Diakses pada 15 July 2021, dari <https://infopublik.id/read/141862/capaian-operasi-dan-latihan-keamanan-dan-keselamatan-bakamla-2015-dan-target-2016.html>
- Iwardhana, Muhammad Ridha; Salam, Usmar. (2015). *Strategi Thailand Dalam Recovery Pariwisata Terhadap Peningkatan International Tourist Arrivals (ITA) Pasca Kerusuhan Politik Tahun 2010-2013*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Iwardhana, Muhammad Ridha; Hapsari Maharani. (2016). *Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Dumping Barang WTO: Studi Kasus Sengketa Kertas Indonesia-Korea Selatan*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- Iwardhana, M. R. (2018). Quo Vadis International Trade: Indonesian Diplomacy Strategy Regarding Settlement WTO with South Korea. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 113–124.

- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) as the Future of Diplomacy for World Solidarity to Overcome the COVID-19 Pandemic. *Global South Review*, 2(1), 25-33.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Sleman: PT Kanisius. 133-136.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Cyber Diplomacy And Protection Measures Against Threats Of Information Communication Technology In Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(2), 345-351.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 1-13.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Widiono Suyud. (2021). *Diplomasi Siber Dan Teknologi Mobile Pada Multidisiplin*. Padang: Partnership on Action for Community Education (PACE). 3-10.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). *DEFENDONESIA*, 6(1), 5-6.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). *Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*. Yogyakarta: AIHII Press. 1-12.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Arisanto, Puguh Toko. (2022). Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(14), No.2.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Winanti, P., & Nurhayati, R. (2022). Promoting Education and Training as Efforts to Improve Human Resources in African Developing Countries. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(2), 767-782. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3698>.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1081-1088.

- Iswardhana, Muhammad Ridha; Attamimi, Attina Maulidia Selma. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(2), 109-120.
- Nasrudin, A. (2020). *Periksa 1.018 Kapal Sepanjang 2020, Bakamla: 24 Diproses*. Diakses pada 16 July 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/17310751/periksa-1018-kapal-sepanjang-2020-bakamla-24-diproses?nomgid=1>
- Nurmamurti, R. A., Navila, S. F., Budi, E. S., Amanda, A. C., & Kholifah, D. S. (2022). Kebijakan Amerika Serikat dalam Menjaga Eksistensi Pasar Global Melalui Perusahaan Coca-Cola (Kapitalisme : Coca Colonization). *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1.925>.
- Pratiwi, T. S. (2018). Understanding the Movement of Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Againts Land Conflict with PT. Asiatic Persada in Jambi Through Social Movement Theory. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.859>
- Pratiwi, T. S. (2020). An Analysis of Humanitarian Military Intervention in Nigeria: Focus on Saving Victims or Defeating Boko Haram? *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i2.41>.
- Pratiwi, T. S., Aliya Hamida, Galih Antonius Ola Lewoema, & Ahmed Varrel Alkahfi Mauza. (2022). ANALISIS KAMPANYE DONASI ORGANISASI COME BACK ALIVE DALAM UPAYA MEMPRODUKSI KEAMANAN DI PERANG RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.104>.
- Okebung.com. (2017, 30 Desember). *Selama 2017, Bakamla RI Amankan 67 Kapal Dengan 39 Perkara*. Diakses pada 15 July 2021, dari <http://www.okebung.com/selama-2017bakamla-ri-amankan-67-kapal-dengan-39-perkara/>
- Purnama, Ari Bayu; Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Kalimantan Border Issues And Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 105-107.

- Puspen TNI. (2016). *Kepala Bakamla RI Infokan Capaian Bakamla RI Selama Dua Tahun*. Diakses pada 16 July 2021, dari <https://tni.mil.id/view-105650-kepala-bakamla-ri-infokan-capaian-bakamla-ri-selama-dua-tahun.html>
- Rahmadani, Y. (2017). *Bakamla dan ABF Gelar Shearwater V*. Diakses pada 23 July 2021, dari <https://www.rmolbengkulu.id/bakamla-dan-abf-gelar-shearwater-v>
- Rahmat, Y. (2018). *Indonesia-Australia Kerjasama Perkuat Keamanan Perbatasan Laut*. Diakses pada 23 July 2021, dari <https://infopublik.id/read/242257/indonesia-australia-kerjasama-perkuat-keamanan-perbatasan-laut.html?video=>
- Rizky, L. (2015). Bisnis Sosial: Sintesis Muhammad Yunus untuk Menggerakkan Kapitalisme di Bangladesh. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0063.23-34>.
- Rizky, L., & Bin Supriyadi, H. S. K. (2021). Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 4(2), 15–28. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944>
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 177–185.
- Rizky, L., Salampessy, M. A. S., & Achdyana, I. (2022a). Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in SoutheastAsian Countries. *JASSP*, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.50>.
- Siagian, M., & Pratiwi, T. (2018). Narcoterrorism in Afghanistan. *Jurnal ICMES*, 2(2), 158-178.
- Tanaem, E., & Arisanto, P. (2020). Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(2), 120 - 139.
- Wibawa, A. and Arisanto, P. T. (2019) “Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao”,

Nation State: Journal of International Studies, 2(2), pp. 105-122. doi:
10.24076/NSJIS.2019v2i2.152.